

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan sosial karena anak berada pada tahap kehidupan yang membutuhkan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta dukungan yang memadai untuk dapat tumbuh dan berkembang secara layak. Perhatian terhadap kesejahteraan anak menjadi semakin penting ketika anak berada dalam kondisi rentan, seperti kehilangan orang tua, berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah, terlantar, atau menghadapi permasalahan sosial lainnya. Anak-anak dalam kondisi tersebut membutuhkan perhatian yang lebih besar karena keterbatasan kondisi keluarga dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, perlindungan, dan keberlangsungan pengasuhan mereka. Permasalahan mengenai anak yatim dan anak rentan juga menjadi perhatian dalam kajian sosial karena kelompok tersebut membutuhkan bentuk perlindungan dan pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing anak (Shawar & Shiffman, 2023).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan pelayanan sosial melalui panti sosial anak. Pelayanan tersebut menjadi salah satu bentuk penanganan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan pembinaan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara langsung mengelola dua panti sosial anak, yaitu Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) “Tri Murni” dan Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAA-BR) “Budi Utama”. Keberadaan panti sosial tersebut memberikan fasilitas pelayanan kepada anak-anak yang membutuhkan, namun kapasitas pelayanan yang tersedia tetap memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, ketika jumlah calon anak asuh yang diajukan melebihi kapasitas yang tersedia, Dinas Sosial perlu menentukan calon anak yang harus lebih dahulu mendapatkan prioritas untuk ditempatkan di panti sosial. Kondisi ini menjadikan proses

penentuan prioritas sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan sosial kepada calon anak asuh.

Permasalahan utama dalam kondisi tersebut bukan hanya bagaimana menentukan apakah seorang anak dapat diterima atau tidak, tetapi bagaimana menentukan urutan prioritas di antara calon anak asuh yang sama-sama memenuhi persyaratan ketika jumlah calon melebihi kapasitas panti. Setiap calon anak asuh dapat memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga tingkat kebutuhan dan prioritasnya juga tidak selalu sama. Ada calon yang memiliki kondisi ekonomi keluarga lebih rendah, ada yang memiliki status sosial yang lebih rentan, ada yang memiliki usia lebih muda, serta terdapat perbedaan kondisi kesehatan dan dukungan keluarga. Perbedaan tersebut perlu dipertimbangkan secara menyeluruh agar calon anak asuh yang memiliki tingkat prioritas lebih tinggi tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pelayanan karena keterbatasan daya tampung panti. Permasalahan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak aspek seperti ini pada dasarnya membutuhkan pertimbangan yang terstruktur agar setiap alternatif dapat dibandingkan berdasarkan kriteria yang relevan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, proses penentuan prioritas calon anak asuh yang berjalan saat ini masih dilakukan melalui pemeriksaan berkas administrasi dan musyawarah berdasarkan kondisi masing-masing calon anak asuh. Hasil penilaian tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan calon yang diprioritaskan masuk ke panti sosial. Pihak Dinas Sosial juga menyampaikan bahwa salah satu kendala yang sering dihadapi adalah jumlah calon anak asuh yang mendaftar lebih banyak dibandingkan kapasitas panti yang tersedia. Selain itu, proses penilaian masih bergantung pada pertimbangan petugas sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan calon yang lebih diprioritaskan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kriteria yang menjadi pertimbangan meliputi status sosial anak, kondisi ekonomi keluarga, kondisi kesehatan, usia, serta rekomendasi dan dukungan keluarga.

Masing-masing kriteria tersebut juga tidak memiliki tingkat kepentingan yang sama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan terletak pada tidak adanya kriteria penilaian, melainkan belum adanya mekanisme pembobotan dan perangkingan yang terstruktur untuk menentukan tingkat prioritas setiap calon anak asuh. Dalam proses yang masih mengandalkan pertimbangan petugas dan musyawarah, setiap calon harus dibandingkan berdasarkan beberapa kondisi yang berbeda. Ketika jumlah calon semakin banyak, proses tersebut menjadi lebih sulit dilakukan secara cepat dan konsisten. Petugas tidak hanya perlu memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai kondisi calon secara bersamaan untuk menentukan siapa yang lebih membutuhkan prioritas. Kondisi seperti ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perbedaan pertimbangan antarpetugas dan menyebabkan proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Hasil analisis sistem dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses yang berjalan belum didukung oleh pembobotan dan perangkingan yang dilakukan secara terkomputerisasi, sehingga petugas masih harus membandingkan kondisi calon secara manual.

Permasalahan subjektivitas dan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan secara manual bukan hanya terjadi pada konteks penentuan calon anak asuh. Penelitian Supriyanto dkk. (2022) menunjukkan bahwa proses penetapan penerima bantuan sosial yang dilakukan secara manual rentan terhadap subjektivitas dan dapat menghasilkan penilaian yang tidak konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu proses seleksi melibatkan banyak calon dan beberapa kriteria, penggunaan pertimbangan manual tanpa mekanisme perhitungan yang terstruktur dapat menjadi kendala dalam menghasilkan keputusan yang konsisten (Supriyanto dkk., 2022.) Temuan tersebut relevan dengan permasalahan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat karena proses penentuan prioritas calon anak asuh juga melibatkan banyak alternatif dan beberapa kriteria yang tingkat kepentingannya berbeda.

Pentingnya permasalahan ini semakin terlihat karena keputusan yang dihasilkan berkaitan langsung dengan kesempatan calon anak asuh untuk memperoleh pelayanan panti sosial. Ketika daya tampung terbatas, tidak semua calon dapat langsung ditempatkan. Dengan demikian, urutan prioritas menjadi penting karena calon yang memperoleh peringkat lebih tinggi seharusnya memiliki kesempatan lebih dahulu untuk ditempatkan selama kuota masih tersedia. Sebaliknya, apabila proses penentuan prioritas tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas, terdapat risiko calon yang memiliki tingkat prioritas lebih tinggi tidak memperoleh kesempatan pada waktu yang tepat karena kuota telah terpenuhi oleh calon lain. Oleh sebab itu, penentuan prioritas bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar keterbatasan kapasitas panti dapat dikelola berdasarkan pertimbangan yang lebih terukur.

Kebutuhan terhadap mekanisme penentuan prioritas yang terstruktur juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai alternatif dan pertimbangan. Abdurrahman dan Mahdiana (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem pendukung keputusan dapat mendukung proses pengambilan keputusan sehingga informasi yang digunakan menjadi lebih terarah. Sementara itu, Baowolo dkk. (2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem pendukung keputusan dengan kombinasi AHP dan SAW dapat digunakan untuk membantu menentukan prioritas dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan sistem berbasis perhitungan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang sebelumnya membutuhkan pertimbangan terhadap berbagai alternatif menjadi lebih terstruktur dan transparan (Baowolo dkk., 2025).

Dalam konteks penelitian ini, kebutuhan tersebut tidak berarti menggantikan keputusan pihak Dinas Sosial. Sistem yang dikembangkan berfungsi sebagai alat bantu untuk mengolah data, memberikan nilai berdasarkan kriteria, dan menghasilkan urutan prioritas yang dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan. Keputusan akhir tetap berada pada pihak Dinas Sosial. Hal ini penting karena keputusan terkait pelayanan sosial kepada anak tidak hanya bergantung pada hasil perhitungan, tetapi juga dapat mempertimbangkan kondisi lapangan dan pertimbangan administratif yang menjadi kewenangan instansi. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan diarahkan untuk membantu petugas memperoleh dasar perhitungan yang lebih jelas, bukan mengambil alih kewenangan pengambil keputusan.

Untuk menghasilkan prioritas yang lebih terukur, penelitian ini menggunakan lima kriteria yang diperoleh berdasarkan kebutuhan dan persyaratan dalam proses penentuan calon anak asuh, yaitu Status Anak, Kondisi Ekonomi Keluarga, Kesehatan, Usia, dan Dukungan Keluarga. Kelima kriteria tersebut dipilih karena menggambarkan beberapa aspek penting dari kondisi calon anak asuh. Status anak berkaitan dengan kondisi sosial dan tingkat kerentanan anak, kondisi ekonomi menggambarkan keadaan keluarga, kesehatan berkaitan dengan kondisi calon anak yang akan mengikuti pelayanan panti, usia berkaitan dengan batas dan kebutuhan pelayanan, sedangkan dukungan keluarga berkaitan dengan persetujuan serta keterlibatan keluarga dalam proses pengasuhan. Berdasarkan hasil wawancara, kelima kriteria tersebut memang digunakan dalam proses penilaian dan memiliki tingkat kepentingan yang berbeda.

Perbedaan tingkat kepentingan antar kriteria menjadi salah satu alasan penting mengapa penelitian ini memerlukan metode pembobotan. Jika seluruh kriteria dianggap memiliki pengaruh yang sama, maka perbedaan tingkat kepentingan yang terdapat dalam proses penilaian tidak dapat direpresentasikan dengan baik. Dalam pengambilan keputusan multikriteria, penentuan bobot diperlukan agar kriteria yang dianggap lebih penting oleh pengambil keputusan dapat memberikan pengaruh yang sesuai terhadap hasil akhir. Penelitian Susanti dan Supriyanto (2024) menunjukkan bahwa metode AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot kriteria dalam penentuan prioritas penerima bantuan sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembobotan kriteria dengan AHP dapat digunakan sebagai dasar dalam proses

pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan membantu mengurangi subjektivitas dalam proses penilaian (Susanti & Supriyanto, 2024).

Selain penelitian tersebut, Supriyanto dkk. (2022) juga menerapkan kombinasi AHP dan SAW dalam menentukan penerima bantuan sosial. AHP digunakan untuk memperoleh bobot berdasarkan tingkat kepentingan kriteria, sedangkan SAW digunakan untuk mengolah nilai alternatif dan menghasilkan urutan prioritas. Penerapan kombinasi tersebut menunjukkan bahwa pembobotan dan perangkingan dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga proses seleksi tidak hanya menghasilkan nilai, tetapi juga menghasilkan urutan alternatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan keputusan (Supriyanto dkk., 2022). Penelitian Susanti dan Supriyanto (2024) juga menunjukkan bahwa integrasi AHP dan SAW dapat digunakan untuk menghasilkan proses seleksi penerima bantuan sosial yang lebih terstruktur dan transparan dibandingkan mekanisme yang hanya mengandalkan penilaian manual.

Metode SAW juga telah digunakan dalam permasalahan yang berkaitan langsung dengan anak asuh. Lailiyah dkk. (2016) menerapkan metode SAW untuk menentukan anak asuh berprestasi pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat Kalimantan Timur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa SAW dapat digunakan untuk melakukan penilaian dan perangkingan anak asuh berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Temuan tersebut memberikan dasar bahwa metode SAW memiliki relevansi dalam permasalahan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak asuh, terutama ketika beberapa alternatif harus dibandingkan untuk memperoleh urutan prioritas (Lailiyah dkk., 2016). Namun, penelitian tersebut berfokus pada penentuan anak asuh berdasarkan prestasi dan belum menggunakan AHP untuk menentukan bobot kriteria secara terstruktur.

Penelitian lain oleh Ramadhan dan Mahdiana (2019) menerapkan metode SAW dalam penentuan prioritas penerima santunan pada Yayasan Cikal Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SAW dapat membantu pihak yayasan dalam menentukan urutan prioritas penerima

santunan. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya kebutuhan terhadap ketelitian dalam pengisian bobot kriteria dan pemahaman pengguna terhadap proses penentuan keputusan (Ramadhan & Mahdiana, 2019.). Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode perangkingan saja masih memiliki keterbatasan apabila penentuan bobot belum dilakukan melalui mekanisme yang dapat menggambarkan tingkat kepentingan kriteria secara sistematis.

Penggunaan kombinasi AHP dan SAW juga telah diterapkan dalam beberapa penelitian bantuan sosial lainnya. Kusuma dkk. (2025) menggunakan kombinasi AHP-SAW untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial di desa. Penelitian tersebut menggunakan beberapa kriteria yang lebih banyak berhubungan dengan kondisi rumah tangga, seperti pekerjaan kepala keluarga, status kepemilikan rumah, jumlah tanggungan, kepemilikan simpanan, bahan bakar memasak, dan kondisi lantai rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AHP dapat menghasilkan bobot kriteria, sedangkan SAW dapat digunakan untuk menghasilkan nilai preferensi dan peringkat alternatif (Kusuma dkk., 2025). Penelitian tersebut menunjukkan kemampuan AHP-SAW dalam menyelesaikan permasalahan seleksi multikriteria, tetapi objek dan karakteristik kriterianya berbeda dengan kebutuhan penentuan prioritas calon anak asuh.

Perbedaan karakteristik objek tersebut menjadi hal yang penting dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan AHP-SAW pada umumnya berfokus pada penerima bantuan sosial berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat atau kondisi rumah tangga. Supriyanto dkk. (2022) berfokus pada penerima Program Keluarga Harapan, Susanti dan Supriyanto (2024) berfokus pada penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria BPS, sedangkan Kusuma dkk. (2025) berfokus pada kelayakan penerima bantuan sosial di desa. Meskipun sama-sama menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan prioritas atau kelayakan, karakteristik calon anak asuh memiliki kebutuhan yang berbeda karena penilaiannya tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga status anak, kesehatan, usia, serta dukungan keluarga.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa model penilaian untuk penerima bantuan sosial tidak dapat langsung diterapkan tanpa menyesuaikannya dengan karakteristik calon anak asuh.

Penelitian Lailiyah dkk. (2016) memang memiliki objek yang berkaitan dengan anak asuh, tetapi fokus penelitian tersebut adalah penentuan anak asuh berprestasi menggunakan SAW. Dengan demikian, terdapat perbedaan tujuan penilaian dengan penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan menentukan anak asuh berdasarkan prestasi, tetapi menentukan tingkat prioritas calon anak asuh untuk memperoleh pelayanan panti sosial ketika jumlah calon yang tersedia melebihi kapasitas penerimaan. Perbedaan fokus tersebut menjadi salah satu alasan penelitian ini perlu dilakukan, karena penentuan prioritas membutuhkan kriteria yang menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, usia, dan dukungan keluarga calon anak asuh.

Selain perbedaan objek dan kriteria, penelitian ini juga memperhatikan adanya penilaian dari lebih dari satu pihak. Berdasarkan proses penelitian, tingkat kepentingan antar kriteria diperoleh melalui penilaian tiga responden dari pihak Dinas Sosial. Penggunaan beberapa responden diperlukan karena penentuan tingkat kepentingan kriteria tidak hanya bergantung pada satu sudut pandang. Perbedaan penilaian antarresponden kemudian digabungkan menggunakan Geometric Mean sehingga diperoleh nilai perbandingan yang mewakili penilaian bersama. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh bobot kriteria yang lebih merepresentasikan pertimbangan pihak yang memahami proses penentuan calon anak asuh. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa AHP dapat digunakan untuk mengakomodasi pembobotan kriteria dalam pengambilan keputusan sosial (Susanti & Supriyanto, 2024).

Dengan demikian, research gap penelitian ini tidak hanya terletak pada penerapan metode AHP-SAW, karena metode tersebut telah digunakan pada beberapa penelitian sebelumnya, tetapi terutama pada objek, kebutuhan penilaian, karakteristik kriteria, serta penerapan hasil perangkingan yang disesuaikan dengan kondisi pelayanan panti sosial. Penelitian ini secara khusus

mengarahkan AHP-SAW pada penentuan prioritas calon anak asuh di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Lima kriteria yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan proses seleksi calon anak asuh, sedangkan bobot kriteria diperoleh berdasarkan penilaian beberapa responden dari pihak Dinas Sosial. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada penerima bantuan sosial berdasarkan kondisi rumah tangga atau kondisi ekonomi masyarakat. Posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan menggabungkan penentuan bobot dengan AHP dan perangkingan dengan SAW, kemudian menghubungkan hasil perangkingan tersebut dengan proses penempatan calon anak asuh berdasarkan kapasitas panti.

Aspek kapasitas panti menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena hasil perangkingan tidak berhenti pada pemberian nilai kepada calon anak asuh. Dua panti yang menjadi bagian dari rancangan penelitian, yaitu PSAA “Tri Murni” dan PSAA-BR “Budi Utama”, memiliki daya tampung yang perlu diperhatikan dalam proses penempatan. Sistem yang dikembangkan menggunakan hasil perangkingan sebagai dasar dalam membantu proses penempatan dengan mempertimbangkan kuota berdasarkan kategori putra dan putri. Calon anak asuh dengan peringkat lebih tinggi diprioritaskan selama kuota masih tersedia, sedangkan calon yang belum dapat ditempatkan karena kapasitas telah terpenuhi dapat dimasukkan ke dalam daftar tunggu. Dengan demikian, hasil perangkingan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai urutan prioritas sekaligus membantu petugas mengelola keterbatasan daya tampung panti.

Kebutuhan terhadap sistem tersebut juga berkaitan dengan transparansi proses pengambilan keputusan. Dalam proses manual, hasil keputusan diperoleh melalui pemeriksaan dokumen, pertimbangan petugas, dan musyawarah, sehingga proses perbandingan antarcalon belum dituangkan dalam suatu tahapan perhitungan yang dapat ditelusuri secara sistematis. Melalui sistem yang dikembangkan, proses pengolahan data dapat dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, bobot kriteria dapat dihitung

melalui AHP, dan nilai setiap calon dapat diolah melalui SAW untuk menghasilkan nilai preferensi dan peringkat. Sistem juga menyediakan informasi mengenai tahapan perhitungan sehingga pengguna dapat melihat matriks keputusan, proses normalisasi, dan hasil perkalian dengan bobot AHP. Fitur tersebut penting agar hasil perangkingan tidak hanya berupa urutan nama calon, tetapi memiliki dasar perhitungan yang dapat diperiksa kembali oleh pengguna.

Dari sisi penelitian, kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya berusaha menerapkan metode AHP dan SAW pada suatu objek baru, tetapi berusaha menjawab permasalahan nyata yang ditemukan pada proses penentuan prioritas calon anak asuh di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan berupa jumlah calon yang dapat melebihi kapasitas panti, banyaknya kriteria yang harus dipertimbangkan, perbedaan tingkat kepentingan antar kriteria, proses penilaian yang masih bergantung pada pertimbangan petugas, serta belum adanya mekanisme pembobotan dan perangkingan terkomputerisasi menjadi alasan utama penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa pendekatan AHP-SAW dapat membantu proses seleksi dan perangkingan pada berbagai permasalahan sosial, tetapi belum secara khusus menyelesaikan kebutuhan penentuan prioritas calon anak asuh dengan karakteristik sebagaimana terdapat pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Supriyanto dkk., 2022; Susanti & Supriyanto, 2024; Kusuma dkk., 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web yang dapat membantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam menentukan prioritas calon anak asuh secara lebih terstruktur. Metode AHP digunakan untuk memperoleh bobot tingkat kepentingan lima kriteria berdasarkan penilaian pihak Dinas Sosial, sedangkan metode SAW digunakan untuk mengolah nilai setiap calon dan menghasilkan urutan prioritas. Kombinasi kedua metode tersebut dipilih karena kebutuhan penelitian tidak hanya memerlukan penentuan tingkat kepentingan setiap kriteria, tetapi juga

memerlukan proses perbandingan dan perangkingan sejumlah calon berdasarkan bobot yang telah diperoleh. Penelitian mengenai penerapan AHP-SAW dalam berbagai permasalahan pengambilan keputusan menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan proses seleksi yang lebih terstruktur dan terukur (Supriyanto dkk., 2022; Susanti & Supriyanto, 2024; Kusuma dkk., 2025).

Melalui sistem yang dikembangkan, proses penentuan prioritas diharapkan tidak lagi hanya bergantung pada perbandingan manual antarcalon, tetapi didukung oleh hasil perhitungan yang memiliki dasar kriteria dan bobot yang jelas. Sistem juga diharapkan dapat membantu petugas dalam mengolah data calon anak asuh, melakukan proses pembobotan, menghitung nilai prioritas, menghasilkan perangkingan, serta mendukung proses penempatan berdasarkan kapasitas panti yang tersedia. Hasil yang diberikan sistem tetap bersifat rekomendasi dan tidak menggantikan kewenangan Dinas Sosial dalam menentukan keputusan akhir. Dengan demikian, penerapan sistem ini diarahkan untuk membantu meningkatkan keteraturan proses, mengurangi perbedaan penilaian, memperjelas dasar penentuan prioritas, dan memberikan informasi yang lebih mudah ditelusuri oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penentuan prioritas calon anak asuh yang memiliki banyak kriteria dan keterbatasan kapasitas panti dengan menyediakan mekanisme pembobotan dan perangkingan yang lebih terstruktur. Selain menghasilkan urutan prioritas, penelitian ini juga diarahkan untuk mendukung proses penempatan calon anak asuh sesuai kapasitas panti dan menyediakan daftar tunggu bagi calon yang belum dapat ditempatkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penerapan metode secara teoritis, tetapi pada penyelesaian kebutuhan nyata di lapangan melalui pengembangan sistem yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan bobot kepentingan setiap kriteria penilaian calon anak asuh menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) secara konsisten dan objektif?
2. Bagaimana menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menghitung nilai prioritas dan menghasilkan perangkingan calon anak asuh berdasarkan bobot kriteria yang telah diperoleh dari metode AHP?
3. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis AHP–SAW untuk menentukan prioritas calon anak asuh serta hasilnya dalam membantu pengambilan keputusan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. Kriteria penilaian calon anak asuh dibatasi pada lima kriteria utama yang ditetapkan berdasarkan dokumen persyaratan dan disepakati bersama pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yaitu: (1) Status Anak (Kerentanan Sosial), (2) Kondisi Ekonomi Keluarga, (3) Kesehatan Calon Anak Asuh, (4) Usia Calon Anak Asuh, (5) Dukungan Keluarga, dengan alternatif penilaian berupa individu calon anak asuh yang mengikuti proses penentuan penerimaan.
2. Metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan bobot kriteria dan *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk melakukan perhitungan nilai prioritas dan perangkingan calon anak asuh.
3. Data penelitian bersumber dari wawancara terstruktur dan kuesioner perbandingan berpasangan (data primer untuk AHP) serta dokumen administrasi dan database digital (data sekunder untuk SAW dan validasi) dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

4. Sistem yang dibangun hanya berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, sehingga hasil yang diperoleh bersifat rekomendasi dan keputusan akhir tetap berada pada pihak Dinas Sosial.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menentukan bobot kepentingan setiap kriteria penilaian calon anak asuh (Status Anak, Kondisi Ekonomi Keluarga, Kesehatan, Usia, dan Dukungan Keluarga) secara konsisten dan objektif dengan menerapkan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) berdasarkan penilaian ahli dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengembangkan model perhitungan dan perangkingan prioritas calon anak asuh dengan mengimplementasikan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang memanfaatkan bobot kriteria hasil perhitungan AHP, sehingga menghasilkan urutan prioritas penerimaan yang sistematis.
3. Merancang dan membangun prototipe Sistem Pendukung Keputusan (SPK) terintegrasi AHP-SAW untuk menentukan prioritas calon anak asuh, serta menguji fungsionalitas sistem dan kesesuaian hasil perhitungan AHP-SAW dengan perhitungan manual dalam membantu proses pengambilan keputusan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Sistem Pendukung Keputusan, khususnya terkait penerapan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam menentukan prioritas calon anak asuh. Di samping manfaat akademisnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengembangkan kajian mengenai pengambilan keputusan berbasis multikriteria, terutama yang berkaitan dengan pelayanan sosial dan kesejahteraan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat :

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Sosial dalam menentukan prioritas calon anak asuh secara lebih terstruktur dan konsisten melalui penggunaan metode AHP–SAW. Sistem yang dibangun dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam mengolah data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga proses seleksi menjadi lebih efisien, terdokumentasi dengan baik, serta dapat meminimalkan perbedaan penilaian antarpetugas.

b. Bagi Petugas atau Tim Seleksi:

Sistem ini mempermudah petugas dalam melakukan penilaian karena perhitungan bobot dan perankingan dilakukan secara sistematis oleh sistem. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada pertimbangan subjektif, tetapi juga didukung oleh hasil perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya :

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem pendukung keputusan pada bidang pelayanan sosial atau permasalahan lain yang melibatkan banyak kriteria, khususnya yang menggunakan metode AHP dan SAW.